

# **BAB III**

## **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TERHADAP IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

### **3.1 Tinjauan Teori Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

#### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri.

#### **3.1.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

- a) Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 Tanggal 27 Desember 1994 tentang penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong pajak Penghasilan Pasal 23
- c) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-76/PJ/1995 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ/1995 Tanggal 31 Januari 1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan dan Jenis Jasa Lain yang atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.
- d) Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- e) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-32/PJ.43/2001 Tanggal 7 Agustus 2001 tentang Pengawasan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- f) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-3/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### **3.1.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas:

a. **Badan Pemerintah**

Termasuk badan pemerintah disini adalah bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar Negara lainnya yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan ( Pasal 21 huruf n Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

b. **Subjek Pajak Badan Dalam Negeri**

Pengertian badan sebagai subjek pajak terdiri dari perseroan terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana (Pasal 2 huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

c. **Penyelenggara Kegiatan**

Kegiatan yang diselenggarakan dapat berupa kegiatan penyelenggara hadiah undian maupun penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh dari penyelenggara kegiatan olahraga ilmiah dan sebagainya (Pasal 12 huruf d penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

d. Bentuk Usaha Tetap

Yaitu sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau oleh badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang dapat berupa:

- Tempat kedudukan manajemen
- Cabang perusahaan
- Kantor perwakilan gedung kantor pabrik
- Bengkel
- Pertimbangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan
- Perikanan, peternakan, pertanian, atau kehutanan
- Proyek konstruksi, instansi, atau proyek perakitan
- Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

e. Perwakilan Usaha Tetap

Berbentuk badan asosiasi, perkumpulan maupun bentuk perusahaan lainnya yang berkedudukan di Indonesia mendapat atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
  - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **3.1.5 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen;
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. Royalti;
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- b. Imbalan sehubungan dengan jenis teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/ PMK.03/ 2015

### **Jasa Lain sebagai Objek Pajak Pasal 23**

Tabel 3.1

<b>No</b>	<b>Jenis Jasa</b>
1	Penilai ( <i>appraisal</i> )
2	Aktuaris
3	Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4	Hukum
5	Arsitektur
6	Perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i> ;
7	Perancang ( <i>design</i> );
8	Pengeboran ( <i>drilling</i> ) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9	Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10	Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11	Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12	Penebangan hutan;
13	Pengolahan limbah;
14	Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli ( <i>outsourcing services</i> );

15	Perantara dan/atau keagenan;
16	Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17	Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18	Pengisian suara ( <i>dubbing</i> ) dan/atau sulih suara;
19	<i>Mixing film</i> ;
20	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , <i>pamphlet</i> , baliho dan <i>folder</i> ;
21	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22	Pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i> ;
23	Internet termasuk sambungannya;
24	Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25	Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26	Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27	Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28	Maklon;
29	Penyelidikan dan keamanan;

30	Penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
31	Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32	Pembasmian hama;
33	Kebersihan atau <i>cleaning service</i> ;
34	Sedot <i>septic tank</i> ;
35	Pemeliharaan kolam;
36	Katering atau tata boga;
37	<i>Freight forwarding</i> ;
38	Logistik;
39	Pengurusan dokumen;
40	Pengepakan;
41	<i>Loading</i> dan <i>unloading</i> ;
42	Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43	Pengelolaan parkir;
44	Penyondiran tanah;
45	Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46	Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47	Pemeliharaan tanaman;
48	Permanenan;
49	Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50	Dekorasi;
51	Pencetakan/penerbitan;
52	Penerjemahan;
53	Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;



54	Pelayanan pelabuhan;
55	Pengangkutan melalui jalur pipa;
56	Pengelolaan penitipan anak;
57	Pelatihan dan/atau kursus;
58	Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59	Sertifikasi;
60	<i>Survey</i> ;
61	<i>Tester</i> ;
62	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

### 3.1.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjam dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

### 3.1.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% x jumlah dividen
2	Bunga	15% x jumlah bunga
3	Royalti	15% x jumlah royalti
4	Sewa	2% x jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	15% x jumlah hadiah/ penghargaan/ bonus
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan	2% x jumlah sewa

	harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% x jumlah imbalan ( tidak termasuk PPN)

Tabel 3.2

Tarif perhitungan pajak penghasilan Pasal 23

**Perbedaan Pengenaan PPh atas Dividen, Bunga, dan Sewa**

Jenis Penghasilan	Pengenaan Pajak	Perhitungan	Penerima
Dividen	Bukan Objek Pajak	-	PT, koperasi, BUMN /BUMD dengan syarat tertentu
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 17 ayat (2) c	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi
Bunga	Bukan Objek Pajak	-	Perusahaan reksa dana atas obligasi
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri

	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan dan bunga obligasi pasar modal
Sewa	PPh Pasal 23	2% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri atas sewa tanah dan/atau bangunan

Tabel 3.3

Perbedaan Pengenaan Tarif PPh atas Dividen, Bunga, dan Sewa

#### Contoh Perhitungan :

1. Larissa Catering (ber-NPWP) merupakan salah satu usaha jasa catering. Pada tanggal 1 Januari 2016 memberikan jasa katering kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 25.000.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas jasa tersebut adalah :

$$2\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 500.000$$

2. Sabbana Service ( tidak memiliki NPWP) merupakan salah usaha jasa pemasangan AC. Pada tanggal 5 Maret 2016 memberikan jasa pemasangan AC kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 5.000.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas jasa tersebut adalah :

$$2\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 100.000$$

**Karena** tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan 2 x dari PPh yang dipotong

$$2 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 200.000$$

### **3.1.8 Saat terutang dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23**

- a. PPh Pasal 23 tertutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. PPh Pasal 23 disetor oleh pemotong Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

### **3.1.9 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotongan PPh memberikan tanda bukti kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan. Bukti pemotongan menggunakan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Terlampir-Lampiran VII) yang dibuat oleh pemotong pajak dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pihak yang dipotong);

- b. Lembar kedua sebagai lampiran bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23); dan
- c. Lembar ketiga sebagai arsip pemotong pajak

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal ini tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 (Terlampir-Lampiran VIII SPT Masa PPh Pasal 23/26) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal ini batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, Hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **3.1.10 Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dokumen yang dibutuhkan dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah (Dirjen Pajak, 2008):

a. Kwitansi

Kwitansi adalah bukti pembayaran telah diadakannya sewa menyewa atau adanya jasa.

b. Berita acara pemeriksaan

Berita acara pemeriksaan berisi tentang pemeriksaan fisik kendaraan yang akan disewakan dari perusahaan vendor yang dinyatakan bahwa kendaraan yang diperiksa dalam kondisi baik dan layak tanpa catatan.

c. Faktur PPN

Faktur PPN ini sebagai bukti pungutan yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan atas Jasa Kena Pajak.

d. Berita acara permohonan pembayaran

Permohonan pembayaran ini berisi tentang laporan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku pihak pertama setuju melakukan pembayaran sebesar yang ditentukan oleh perusahaan vendor.

e. Surat pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Surat pengukuhan ini digunakan apakah perusahaan sudah menjadi PKP atau belum. Sudah tau belumnya menjadi PKP akan berpengaruh pada perhitungan pajaknya. Apabila tidak ber-NPWP maka tarif pajaknya sebesar 4%.

f. Fotokopi NPWP

Fotokopi NPWP digunakan sebagai syarat apakah perusahaan vendor benar-benar menjadi PKP atau belum.

g. Berita acara serah terima pemeriksaan fisik kendaraan

Berita acara ini disampaikan oleh perusahaan vendor bahwa kendaraan dapat beroperasi setelah adanya pemeriksaan fisik dan dapat digunakan sesuai kontrak perjanjian tersebut.

### **3.1.11 Surat Setoran Pajak (SSP)**

#### **3.1.11.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak menurut UU KUP No 28 Tahun 2007 adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **3.1.11.2 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi

#### **3.1.11.3 Macam-Macam Surat Setoran Pajak (SSP)**

##### **a. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar**

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ/2006).

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara *online* tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran atau



pemungutah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar dibuat rangkap 5, yang diperuntukkan sebagai berikut :

- Lembar ke-1, untuk arsip Wajib Pajak;
- Lembar ke-2, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Lembar ke-3, untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
- Lembar ke-4, untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
- Lembar ke-5, untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ke-2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No **Per-01/PJ/2006**, serta Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan lampiran ke-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No **Per-01/PJ/2006**, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam

administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerimaan Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak SSP Khusus dicetak ketika :

- Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke- dan lembar ke-3 SSP Standar.
- Terpisah sebanyak 1 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

c. SSPCP (Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor)

Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan importer atau Wajib Bayar dalam rangka impor. Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor dibuat dalam rangkap 8 yang diperuntukkan sebagai berikut :

- Lembar ke-1a, untuk KPBC melalui Penyetor;
- Lembar ke-1b, untuk Penyetor;
- Lembar ke-2a, untuk KPBC melalui KPPN;
- Lembar ke-2a dan Lembar ke-2c, untuk KPP melalui KPPN;
- Lembar ke-3a dan Lembar ke-3b, untuk KPP melalui Penyetor;
- Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT POS Indonesia.

d. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri)

Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri adalah Surat Setoran Pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSPC dibuat dalam 6 rangkap, yaitu diperuntukkan :

- Lembar ke-1a, untuk KPBC melalui Penyetor;
- Lembar ke-1b, untuk Penyetor;
- Lembar ke-2a, untuk KPBC melalui KPPN;
- Lembar ke-2b, untuk KPP melalui KPPN;
- Lembar ke-3, untuk KPP melalui Penyetor;
- Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi.

### **3.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **3.1.12.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 11 SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **3.1.12.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 3 ayat (1) fungsi SPT adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan

atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  - Harta dan kewajiban;
  - Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- a. Bagi PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPn dan PPnBm yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### **3.1.12.3 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

a. SPT Masa

SPT (Surat Pemberitahuan) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat.

- Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, dan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

b. SPT Tahunan

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

➤ Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

### **3.1.13 Surat Tagihan Pajak (STP)**

#### **3.1.13.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat Tagihan Pajak yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

#### **3.1.13.2 Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)**

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak,
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda,
- c. Sarana untuk menagih pajak.

#### **3.1.13.3 Penyebab Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)**

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapya faktur pajak.

#### **3.1.14 Sanksi Tidak Melakukan Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23**

Undang-Undang KUP memberikan sanksi kepada pemotong/pemungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong/pemungut pajak.

1. **Sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan** (pasal 3 ayat 3, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP):

- a) Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP (berisi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan).

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP (berkaitan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan).

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

## **2. Sanksi administrasi sehubungan tidak menyetorkan uang pajak yang dipotong/dipungut ke kas negara.**

- a) Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2a Undang-Undang KUP.

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b) Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- a. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- c. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

c) Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang KUP.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.



d) Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang KUP.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;
- b. Sanksi pidana pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP: Lupa memberikan bukti potong/pungut.

- tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen

lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **3.2 Tinjauan Praktik Prosedur Potongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I. Dalam hal ini menggunakan *With Holding Tax System* yang berarti dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh Undang-Undang perpajakan untuk memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiskus maupun Wajib Pajak. Yang diberi wewenang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan potongan pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Bendaharawan Pengeluaran Pembantu disetiap bidang. Prosedur potongan PPh 23 melalui format yang tersedia di homepage Direktorat Jenderal Pajak dan proses pembayarannya melalui Bank Persepsi.

Secara praktiknya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah hanya mengampu pada beberapa jenis objek pajak PPh 23, yaitu:

- a. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.

- b. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- c. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- d. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
- e. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- f. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- g. Jasa katering atau tata boga

Pihak yang terkait serta fungsi yang terkait dalam pemotongan pajak adalah:

- a. Perusahaan vendor  
Perusahaan vendor merupakan perusahaan yang memberikan jasa kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:
  - 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat bukti potong PPh 23 dengan menggunakan e-Billing.
  - 2) Pemotong merupakan bagian yang memeriksa, memotong serta melaporkan pajaknya.
- c. Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak  
Bank Persepsi menerima pembayaran pajak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I  
Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I merupakan tempat untuk pelaporan berkas pajak.

### **3.2.1 Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Pertemuan Rapat Koordinasi Institusi Diknakes di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Maret 2016. Dalam rapat itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 100 snack untuk jamuan para tamu dengan biaya sebesar Rp 4.400.000. Dalam hal itu berarti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan jasa catering. Menggunakan catering UD Asri NPWP 07-109-794-3-503.000. Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering sebesar = Nilai Objek Pajak x 2%

- PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah:


$$2\% \times \text{Rp } 4.400.000 = \text{Rp } 88.000$$

Saat Bendaharawan melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 membutuhkan : Kwitansi, Faktur PPN, Berita acara permohonan pembayaran, Surat pengukuhan PKP, Foto copy NPWP

### 3.2.2 Proses Pembuatan Bukti Potong yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

#### 1. Pengisian Identitas Perusahaan

Identitas Perusahaan penyedia Jasa Catering seperti NPWP UD Asri, Nama Wajib Pajak, Alamat.

		Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak		
		Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak		
 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI (2)</p>				
<p><b>BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b></p> <p><b>NOMOR : (2)</b></p>				
NPWP	:	0 7 1 0 9 7 9 4 3 5 0 3 0 0 0	(3)	
Nama Wajib Pajak	:	U.D Asri		
Alamat	:	Jl. Piere Tendean No. 24. Semarang		

Gambar 3.1

Memasukan Jenis Penghas

--	--	--	--	--	--

Figure 1: 2.2

#### 4.1.1. Data

Dartame isikron tanggal dilel

Gambar 3.3  
Formulir Bukti Pemotongan Bagian Pengisian Identitas  
Pemotong Pajak

4. Pemberian nomor dokumen dan tanggal pelaksanaan  
Pemberian nomor dokumen harus sesuai dengan urutan dan bergantung pada bank partner apa perusahaan membayarnya. Bank partner tersebut antara lain : Bank BNI, Mandiri, Kantor Pos.

Gambar 3.4  
Formulir Bukti Pemotongan Bagian Nomor Dokumen

### 3.2.3 Proses Perekapan Bukti Potong oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Perekapan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setiap Masa Pajak dalam satu tahun. Dengan memasukan semua jenis jasa yang dilakukan dalam satu masa pajak tahun tersebut. Cara pengisiannya yaitu:

Pengisian

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>Masa Pajak</b> <small>(Bulan/Tahun)</small> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">3</div> <div style="margin: 0 2px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">6</div> </div>		
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak ( Rp )	PPh Yang Dipotong ( Rp )
(1)	(2)	(3)	Nomor	Tanggal	(6)	(7)

dibagian kolom Masa Pajak. Isikan Bulan dan Tahun sesuai dengan masa pajak yang ada di bukti potong.

Gambar 3.5

## Formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak Bagian Masa Pajak

Masukan NPWP, Nama Wajib Pajak, Bukti Pemotongan yang berisikan Nomor dan Tanggal terjadinya transaksi, Nilai Objek Pajak dan PPh yang dipotong sesuai pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan.

[illegible]

Gambar 3.6

## Formulir Daftar Bukti Pomotongan Bagian Isi

Pengisian Identitas pemotong pajak yaitu Nama Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, NPWP, Tanggal dan Tahun serta Tanda Tangan Pemotong.

	Jumlah			4.400.000	88.000
<b>B. PPH Pasal 26</b>					
1.					
2.					
Jumlah					
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal 0 3 2 0 1 7			
Nama BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG BINDAL SDK		tanggal bulan tahun			
NPWP 0 0 7 3 2 0 3 4 4 5 1 2 0 0 0		Tanda Tangan & Cap			
<b>D.1.1.32.05</b>					

Gambar 3.7

Formulir Daftar Bukti Pemotongan Bagian Identitas Pemotong

### 3.2.4 Proses Pembuatan Surat Setoran Pajak oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. NPWP, Nama WP, Alamat WP diisi sesuai dengan NPWP yang dimiliki bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

LEMBAR 5  
Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak lain

NPWP : 0 0 7 3 2 0 3 4 4 5 1 2 0 0 0  
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bindal SDK

ALAMAT WP : Jl. Piere Tendean 24 Semarang



Gambar 3.8

Formulir Surat Setoran Pajak Bagian Identitas Pemotong Pajak

2. Kode Akun Pajak diisi dengan angka akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
3. Kode Jenis Setoran diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
4. Uraian Pembayaran diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Kode Akun Pajak	Kode jenis setoran	Uraian Pembayaran :
1 4 1 1 1 2 4	1 0 4	..... PPh 23 : Biaya Makanan dan Minuman dalam rangka ..... Pertemuan Rapat Koordinasi Institusi Diknakes Di Dinas ..... Kesehatan Prov.Jateng selama 1 ( satu ) hari pada tanggal
Masa Pajak		23 Maret 2016

Gambar 3.9

Formulir Surat Setoran Pajak Bagian Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, Uraian Pembayaran

5. Masa Pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
6. Tahun Pajak diisi tahun terutangnya pajak.

Kode Akun Pajak		Kode jenis setoran		Uraian Pembayaran :	
411124		104		PPh 23: Biaya Makanan dan Minuman dalam rangka Pertemuan Rapat Koordinasi Institusi Dinkes Di Dinas Kesehatan Prov. Jateng selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Maret 2016	
Masa Pajak					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tahun Pajak					
2016					
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan					
Diisi tahun terutangnya pajak					
Nomor Ketetapan					
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT					

Gambar 3.10

Formulir Surat Setoran Pajak Bagian Masa Pajak dan Tahun Pajak

7. Jumlah Pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Terbilangnya diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Nomor Ketetapan	
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT	
Jumlah Pembayaran	Rp. 88.000,-
Diisi dengan rupiah penuh	
Terbilang	Delapan puluh delapan ribu rupiah

Gambar 3.11

### Formulir Surat Setoran Pajak Bagian Jumlah Pembayaran dan Terbilang

8. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
9. Wajib Pajak/Penyetor diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

Gambar 3.12


### Formulir Surat Setoran Pajak Bagian Tanggal Pembayaran dan Penyetoran Bendahara Ke Bank Persepsi

#### 3.2.5 Proses Pembayaran ke Bank Persepsi oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Setelah SSP lengkap, maka selanjutnya dilakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya di Bank BNI, namun sebelum pembayaran harus membuat giro terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pembayarannya. Setelah semuanya selesai akan diberikan bukti pembayaran oleh Bank, yang nantinya dicopy dan dilaporkan ke KPP.

### 3.2.6 Proses Pembuatan SPT oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah


1. Berikan tanda silang pada pilihan kolom SPT Normal / SPT Pembetulan dan isikan Masa Pajaknya.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
		Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 6	

Gambar 3.13

#### Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Bagian Masa Pajak

2. Pengisian Bagian A yang berisikan Identitas Pemungut Pajak diantara lain : NPWP, Nama, Alamat.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
		Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 6	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK			
1 NPWP : 0 0 7 3 2 0 3 4 4 - 5 1 2 0 0 0			
2 Nama WP : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bindal SDK			
3 Alamat : Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang			

Gambar 3.14

### Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Bagian Identitas Pemungut Pajak

3. Pengisian Bagian B yang berisikan Objek Pajak pilihan pertama PPh Pasal 23 yang telah dipotong. Masukkan sesuai pilihan objek pajaknya. Karena Dinas Kesehatan melakukan pemotongan atas Jasa Catering maka isikan pada kolom No 6. Isikan Jumlah Penghasilan Bruto dan PPh yang dipotong.

BAGIAN B. OBJEK PAJAK			
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong			
URAIAN	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan Penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa Lain : ***)			
1) Jasa Catering		4.400.000	88.000
2) Jasa Lain-Lain			
3) .....			
7. ....			
<b>J U M L A H</b>		4.400.000	88.000
Terbilang : delapan puluh delapan ribu rupiah			

Gambar 3.15

### Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Bagian PPh 23 yang Telah Dipotong

4. Pengisian Bagian C yang berisikan Lampiran. Isikan tanda x sesuai lampiran yang telah disediakan oleh Bendaharawan.

BAGIAN C. LAMPIRAN	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 21 5.	Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : 1 lembar.	berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Gambar 3.16

### Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Bagian Lampiran

5. Pengisian Bagian D berisikan Pernyataan dan Tanda Tangan yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN		Diisi Oleh Petugas	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		SPT Masa Diterima	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		<input checked="" type="checkbox"/> Langsung dari WP	
Nama BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG BINDAL K2PK		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
NPWP 00 7 3 2 0 3 4 4 5 1 2 0 0 0		Pos	
Tanda Tangan & Cap		tanggal bulan tahun	
Tanggal 0 3 2 0 1 7		Tanda Tangan	

Gambar 3.17

### Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Bagian Pernyataan dan Tanda Tangan Pemungut

#### 3.2.7 Proses Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I

Setelah pembayaran dilakukan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah membuat Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bukti pelaporan ke KPP. Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi saat pelaporan membutuhkan dokumen yaitu Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan SPT Masa. Bendaharawan menyerahkan semua dokumen kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I kemudian dilakukan penginputan. Setelah penginputan selesai

Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diberi Bukti telah melakukan Pelaporan PPh Pasal 23. Bukti Pelaporan akan tertera bahwa SPT yang dilaporkan NIHIL/Kurang Bayar/Lebih Bayar.

**3.2.8 Bagan Alur Proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan modal, penyerahan jasa dan pengadaan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21



Disetor oleh pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bank persepsi atau kantor pos dan giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh rekanan



Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diterima pembayarannya oleh bank persepsi diberikan tanda terima berupa tanggal penyetoran, tanda tangan dan cap dari bank persepsi



Wajib Pajak diberikan Surat Setoran pajak lembar ke-1, 3, dan 5 sedangkan lembar ke-2 dan 4 dipegang oleh bank



Kemudian Wajib Pajak melapor selambat-lambatnya 10 hari setelah Masa Pajak berakhir